

Maklumat 5 September dan Kepercayaan RI

PADA tanggal 5 September 2018 ini genap 73 tahun keluarnya Maklumat 5 September. Maklumat ternyata mempunyai dampak luar biasa bagi tetap tegaknya Republik Indonesia. Hal ini juga tidak terlepas dari hasil pemikiran yang sangat luhur dan luar biasa dari Sri Sultan HB IX. Mengapa demikian?

Teks Proklamasi Kemerdekaan RI dibacakan oleh Soekarno didampingi oleh Moh Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah membacakan teks Proklamasi, Soekarno menyatakan bahwa Bangsa Indonesia sudah merdeka. Gema proklamasi dengan cepat menyebar ke masyarakat dan ke seluruh penjuru dunia.

Meskipun hanya dengan teknologi yang sangat sederhana, proklamasi dengan segera mendapat dukungan luas dari masyarakat Indonesia. Dukungan tersebut diekspresikan dalam berbagai bentuk. Ada yang segera mengadakan rapat-rapat dan menghiasi jalan-jalan, ada yang melucuti senjata Jepang, dan ada pula yang mengibarkan bendera Merah Putih.

Tokoh pertama yang mengucapkan selamat atas terselenggaranya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII dari Yogyakarta. Ucapan selamat ini disampaikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta pada 18 Agustus 1945.

Tanggal 19 Agustus 1945, Sri Sultan dan Sri Paku Alam mengadakan sidang istimewa di Gedung Sono Budoyo. Sidang tersebut antara lain memutuskan mendukung Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan tunduk pada perintah dari Jakarta. Pada 20 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengirim surat ucapan selamat atas terpilihnya Bung Karno dan Bung Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Sri Sultan dan Sri Paku Alam juga menyatakan berdiri di belakang kepemimpinan mereka berdua. Pernyataan tersebut diikuti dengan dikeluarkannya amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang kemudian terkenal dengan nama Maklumat 5

A Kardiyat Wiharyanto

September.

Adapun bunyi lengkap maklumat tersebut adalah sebagai berikut: *"Kami Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat menyatakan, bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia. Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri*



Ngayogyakarta Hadiningrat. Oleh karena itu berhubungan dengan keadaan dewasa ini, segala urusan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya. Bahwa perhubungan antara Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan amanat kami ini". Sedangkan isi maklumat atau amanat dari Sri Paku Alam VI-II sama dengan yang dikeluarkan oleh Sultan.

Menanggapi surat dan amanat Sri Sultan dan Sri Paku Alam ini Presiden Republik Indonesia mengirim utusan khusus yang terdiri dari Menteri Negara Mr Sartono dan Menteri Keuangan Mr Maramis. Melalui utusan ini, Presiden Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas dukungan penguasa Yogyakarta ini. Utusan ini juga memberikan piagam atas penyatuan Yogyakarta dengan RI. Selain itu, utusan tersebut juga memberi kepercayaan dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII atas Yogyakarta.

Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII diikuti dengan berbagai aksi masyarakat. Pada bulan September itu pula masyarakat Yogyakarta melakukan perebutan kekuasaan secara serentak di berbagai tempat di Yogyakarta. Para pegawai instansi pemerintah yang perusahaannya dikuasai Jepang melakukan aksi pemogokan. Mereka memaksa agar Jepang menyerahkan semua kantor mereka kepada Indonesia. Keesokan harinya Komite Nasional Daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di Yogyakarta sepenuhnya berada di tangan pemerintah Republik Indonesia.

Hijrah

Tiba-tiba Tentara Sekutu masuk ke Indonesia, sehingga Jakarta terancam. Presiden dan Wakil Presiden RI hijrah ke Yogyakarta. Sejak itu Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan dan pusat perjuangan untuk mempertahankan RI. Akhirnya, dari Yogyakarta pulalah penjajah menyinggalkan Indonesia.

Kesemuanya itu tidak terlepas dari Maklumat 5 September yang meyakinkan pemerintah pusat bahwa Yogyakarta bisa dipercaya dan bisa bertanggung jawab atas kelangsungan hidup RI. Hal ini juga menunjukkan bahwa Maklumat 5 September merupakan sikap Sri Sultan HB IX yang sangat heroik dan menakjubkan. □ - g

**) Drs A Kardiyat Wiharyanto MM,
Dosen Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta.*